

## **PENGARUH PENERAPAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN NAGEKEO**

Rikhardus Kodhi Sada

*e-mail: [Rikharduskodhi@gmail.com](mailto:Rikharduskodhi@gmail.com)*

Anwar Made

Eris Dianawati

*(Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Kanjuruhan Malang)*

### ***Abstrak***

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Nagekeo. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, dengan menggunakan data primer yaitu melalui penyebaran kuesioner. Responden dalam penelitian ini adalah bagian pengelolaan keuangan dari 35 SKPD Kabupaten Nagekeo. Variabel dalam penelitian ini adalah Sistem Pengendalian Intern pemerintah sebagai variabel independen dan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah sebagai variabel dependen. Analisis data menggunakan metode statistik regresi berganda. Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa penerapan sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Nagekeo.

Kata Kunci: *Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.*

### ***Abstract***

This study aims to determine the effect of the Implementation of the Government Internal Control System on the Quality of the Financial Statements of the Regional Government of The Nagekeo Regency. This research uses a quantitative approach, using primary data through questionnaires. Respondents in this study are part of the financial management of 35 SKPD Nagekeo Regency. The variables are the Government Internal Control System as an independent variable and the Quality of Government Financial Statements as the dependent variable. Data analysis uses multiple regression statistical methods. Hypothesis test results indicate that the application of the government's internal control system has a positive and significant effect on the quality of the financial statements of the Nagekeo Regency government.

Keywords: *Quality of the Financial Statements of the Regional Government, Government Internal Control System.*

### **PENDAHULUAN**

Tantangan yang dihadapi oleh pemerintah daerah dalam rangka memenuhi kewajibannya memberikan pertanggungjawaban publik adalah menyediakan informasi mengenai kinerja pemerintah daerah kepada para pemangku kepentingannya (*stakeholder*). Pemangku kepentingan

yang utama adalah masyarakat dan dewan legislatif daerah (DPRD). Sebagai perwujudan akuntabilitas, pemerintah daerah diwajibkan untuk menyusun laporan keuangan. Laporan keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara/daerah selama suatu periode. Hal ini diatur dalam undang-undang Nomor

17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Upaya yang nyata untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah adalah dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Ada banyak pihak yang mengandalkan informasi keuangan yang disajikan dan dipublikasikan oleh pemerintah daerah dengan kegunaan berbeda-beda, sehingga laporan yang disajikan tersebut harus berkualitas. Laporan keuangan dikatakan berkualitas jika laporan keuangan yang disajikan tersebut memenuhi syarat normatif yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami.

Pengguna laporan keuangan berasal dari berbagai pihak dengan berkepentingan yang berbeda-beda. Pengguna laporan keuangan pemerintahan antara lain (PP 71 Tahun 2010): masyarakat, wakil rakyat, lembaga pengawas, lembaga pemeriksa, pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi dan pinjaman, serta pemerintah. Dalam PP No. 71 Tahun 2010 diungkapkan bahwa, karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran- ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Karakteristik kualitatif yang merupakan prasyarat normatif antara lain: (1) relevan, (2) andal, (3) dapat dibandingkan, (4) dapat dipahami.

Untuk dapat memenuhi karakteristik kualitatif tersebut, maka pengelolaan keuangan di pemerintah daerah tidak terlepas dari peran pegawai yang mengelola dan melakukan pelaporan keuangan. Selain itu, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sebagai metode untuk dapat mengawasi dan memberi keyakinan tercapainya tujuan suatu organisasi menjadi penting, sehingga hal-hal yang telah direncanakan dapat terlaksana.

Sistem Pengendalian Intern (SPIP) yang memadai juga sangat diperlukan. Berdasarkan PP No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan laporan keuangan, pengamatan asset Negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh dilingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terdiri dari beberapa unsur, diantaranya (PP 60 Tahun 2008): (1) lingkungan pengendalian, (2) penilaian resiko, (3) kegiatan pengendalian, (4) informasi dan komunikasi, (5) pemantauan pengendalian intern. Dalam PP 60 Tahun 2008, seluruh proses kegiatan audit, review, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolak ukur yang telah dilaksanakan secara efektif dan efisien dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik disebut dengan pengawasan intern. Pengawasan dalam Sistem Pengendalian Intern diarahkan diantara lain untuk mendapatkan keyakinan yang wajar terhadap efektivitas organisasi, keandalan laporan keuangan, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang- undangan.

## KAJIAN PUSTAKA

### **Sistem Pengendalian Intern (SPI)**

Menurut Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh

pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan laporan keuangan, Pengamanan asset Negara, dan ketaatan terhadap Peraturan Perundang-undangan. Unsur-unsur sistem Pengendalian Intern dalam Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang dikutip oleh Darise (2009: 302) meliputi lingkungan pengendalian (*control environment*), penilaian resiko (*risk assessment*), informasi dan komunikasi (*information and communication*), aktivitas pengendalian (*control activities*), dan pemantauan (*monitoring*).

### **Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**

Kualitas laporan keuangan dapat dikatakan baik, apabila informasi yang disajikan dalam laporan keuangan tersebut dapat dipahami, dan memenuhi kebutuhan pemakaiannya dalam pengambilan keputusan, bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material serta dapat diandalkan, sehingga laporan keuangan tersebut dapat dibandingkan dengan periode-periode sebelumnya. Namun demikian, perlu disadari bahwa laporan keuangan tidak menyediakan semua informasi yang mungkin dibutuhkan pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi. Secara umum, laporan keuangan menggambarkan pengaruh dari kejadian masa lalu, dan tidak diwajibkan untuk menyediakan informasi non keuangan (Yosefrinaldi, 2013). Mahmudi (2010) mengatakan, memang laporan keuangan bukan merupakan satu-satunya informasi sebagai dasar untuk pengambilan keputusan.

Menurut Harahap (2002:67) tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam mengambil keputusan ekonomi. Hal ini dapat dipahami bahwa laporan keuangan merupakan hasil akhir dari proses akuntansi yang menjadi sumber informasi bagi para pemakainya untuk proses pengambilan keputusan yang menggambarkan indikator dan kesuksesan dalam mencapai tujuannya.

Karakteristik kualitatif laporan keuangan berdasarkan PP No. 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintah (SAP) merupakan ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam penyampaian informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Empat karakteristik kualitatif tersebut diantaranya:

- 1) Relevan, laporan keuangan dikatakan relevan apabila informasi yang termuat didalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu dan masa kini, memprediksi masa depan, serta mengoreksi hasil evaluasi mereka dimasa lalu. Relevan memiliki unsur-unsur sebagai berikut:
  - a. Manfaat umpan balik (*feedback value*)  
Informasi memungkinkan pengguna untuk menegaskan atau mengoreksi ekspektasi mereka dimasa lalu.
  - b. Memiliki manfaat prediktif (*predictive value*)  
Informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini.
  - c. Tepat waktu  
Informasi disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan.
  - d. Lengkap  
Informasi keuangan pemerintah disajikan selengkap mungkin, mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan dengan memperhatikan kendala yang ada.
- 2) Andal, informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi

yang andal memenuhi karakteristik berikut:

- a. Penyajian Jujur  
Informasi menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan.
  - b. Dapat Diverifikasi (*verifiability*)  
Informasi yang disajikan harus dapat diuji, dan jika dilakukan pengujian lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, maka hasilnya tetap menunjukkan kesimpulan yang jauh berbeda.
  - c. Netralitas  
Informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu.
- 3) Dapat Dibandingkan  
Informasi laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan pada entitas lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan secara internal dapat dilakukan bila entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ketahun. Perbandingan eksternal dapat dilakukan bila entitas yang diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama.
- 4) Dapat Dipahami  
Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna.

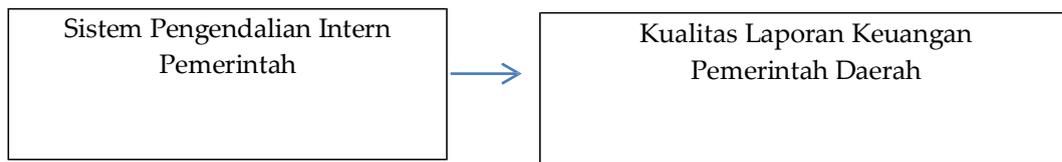
#### **Penelitian Terdahulu**

Beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan Penerapan Sistem Pengendalian Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah diantaranya dikutip dari beberapa sumber diantaranya yaitu Penelitian Suhaili (2012) dengan unit analisis individual, objek penelitian dilingkungan pemerintah SKPD Kota Subulussalam, dengan variabel independen (penerapan sistem pengendalian intern pemerintah dan peran auditor internal pemerintah) dan variabel dependen (pengelolaan keuangan daerah). Jumlah penerapan SAP dan SPIP mempengaruhi kualitas laporan keuangan SKPD dimana kedua variabel tersebut berpengaruh secara positif terhadap kualitas laporan keuangan. Penelitian yang dilakukan oleh Tuti Herawati, meneliti Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (survei pada organisasi perangkat daerah pemda cianjur). Hasil penelitiannya menyatakan bahwa Sistem pengendalian intern berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Wati, Herawati dan Sinarwati (2014) menunjukkan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintahan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Hal ini berarti semakin baik penerapan standar akuntansi pemerintahan, maka akan terjadi peningkatan kualitas laporan keuangan daerah.

Hasil penelitian Syamsuar (2013) menunjukkan bahwa dengan diterapkannya sistem pengendalian intern dapat meningkatkan keandalan laporan keuangan yang merupakan salah satu prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah daerah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki. Hasil penelitian Nurmaziah (2013) juga mendapatkan hasil yang sama bahwa penerapan SPI berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

### Kerangka Pemikiran



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

### Perumusan Hipotesis

#### Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Pengendalian intern adalah suatu tindakan pimpinan dan jajarannya untuk memberikan jaminan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, andal, pengamanan asset, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan (Mahmudi, 2010). Masih ditemukan penyimpangan dalam pemeriksaan laporan keuangan menunjukkan bahwa laporan keuangan pemerintah belum memenuhi karakteristik yaitu keterandalan. Pengendalian intern yaitu cara yang dapat memberikan arah serta memiliki peran dalam pencegahan kecurangan atau *fraud*. Menurut Ariesta (2013), hasil evaluasi pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menunjukkan bahwa masih terdapat Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang memperoleh opini tidak wajar dan memerlukan perbaikan pengendalian intern dalam hal keandalan laporan keuangan.

Menurut Yudianta dan Erawati (2012) pengendalian intern akuntansi berpengaruh positif terhadap kualitas informasi akuntansi. Hal ini didukung dengan penelitian Zuliarti (2012) bahwa pengendalian intern akuntansi berpengaruh positif terhadap keterandalan pelaporan keuangan daerah. Penelitian Yosefrinaldi (2013) menemukan hasil bahwa, sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan uraian diatas maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:

H<sub>1</sub> : Sistem Pengendalian Intern Pemerintah berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

### Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Metode penelitian kuantitatif merupakan metode penelitian yang berdasarkan pada filsafat, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif atau statistik, dengan tujuan menguji hipotesis yang telah ditetapkan (Sugiono, 2010).

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang merupakan data yang diperoleh dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Nagekeo yang menjadi tempat penelitian. Data yang digunakan adalah data primer. Dimana data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara). Indriantoro & Supomo (2002). Metode pengumpulan data yang digunakan adalah dengan mendatangi secara langsung kantor SKPD Kabupaten Nagekeo dan memberikan kuesioner yang berisi pertanyaan terstruktur yang ditujukan kepada responden, yaitu PPTK, PPK, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran. Dalam pengumpulan data, peneliti menunggu responden menjawab semua kuesioner yang telah disediakan sebelumnya. Untuk dapat menyelesaikan penyebaran kuesioner tersebut, peneliti memperkirakan waktu selama 2 minggu.

Dalam penelitian ini terdiri dari variabel bebas yaitu sistem pengendalian intern (X) dan variabel terkait yaitu kualitas laporan keuangan (Y). Peneliti menggunakan metode analisis data sebagai berikut: uji kualitas data, uji asumsi dasar, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis.

## Metode Analisis Data

### Uji Analisis Data

#### a. Uji validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang diukur oleh kuesioner tersebut. Teknik yang digunakan untuk melakukan uji validitas adalah dengan menggunakan koefisien korelasi *Pearson correlation*. Data dikatakan valid apabila korelasi antar skor masing-masing butir pertanyaan dengan total skor setiap konstruksinya signifikan pada level 0,05 maka pertanyaan tersebut dikatakan valid (Ghozali 2011).

#### b. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas dimaksud untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Uji reliabilitas diukur dengan uji statistik *cronbach's alpha* ( $\alpha$ ), yaitu suatu variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai *cronbach's alpha*  $> 0,70$  (nunnally,1994 dalam Ghozali, 2011).

### Uji Asumsi Dasar

#### Uji Normalitas Data

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal (Ghozali, 2011). Uji normalitas yang digunakan yaitu *kolmogorov-smirnov* dengan menggunakan taraf signifikan 0,05. Dasar penarikan kesimpulan adalah data dikatakan berdistribusi normal apabila  $q$ - *kolmogorov-smirnov test*  $> 0,05$  (Ghozali, 2011).

### Uji Asumsi Klasik

#### a. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel bebas (independen). model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Uji multikolinearitas dapat dilihat dari besarnya nilai VIF (*variance inflation factors*) dan nilai toleransi. Jika nilai toleransi  $> 0,10$  atau sama dengan nilai VIF  $< 10$ , artinya tidak ada korelasi antara variabel atau tidak terjadi multikolinearitas antar variabel bebas (Ghozali, 2011).

#### b. Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas ini memiliki tujuan untuk menguji apakah dalam model terjadi kesamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain atau untuk melihat penyebaran data. Jika varian dari residual satu ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut homokedastisitas dan jika berbeda disebut Heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah tidak terdapat Heteroskedastisitas. Uji ini dilakukan dengan metode Glejser yang mengusulkan untuk meregres nilai absolut residual terhadap variabel independen (Gujarati, 2003 dalam Ghozali, 2011) dengan persamaan regresi:  $|U_t| = \alpha + \beta X_t + v_t$

### Analisis Data

Analisis data yang digunakan untuk menguji hipotesis yang dirumuskan adalah analisis regresi linear berganda dengan bantuan *Software SPSS 16.0*. Analisis regresi berganda menunjukkan pengaruh hubungan antara dua variabel yaitu variabel independen terhadap variabel dependen

dengan persamaan sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta X$$

Keterangan:

Y: Variabel terkait (Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah) X: Variabel bebas (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah)

$\alpha$  : Konstanta

$\beta$ : koefisien regresi (nilai peningkatan maupun penurunan)

### Pengujian Hipotesis

#### Uji statistik t ( t - test)

Pengujian hipotesis dilakukan dengan uji regresi secara parsial (uji t).

Uji statistik t pada dasarnya untuk mengetahui pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variabel dependen secara signifikan. Jika probabilitas sig < 0,05 maka variabel independen secara individual mempengaruhi variabel dependen (Ghozali, 2011).

## Hasil Penelitian Dan Pembahasan

### Hasil Uji Validitas

Tabel 4.7  
Hasil Uji Validitas

Nama Variabel	Pearson Correlation (Validitas)	Sig.(2-Tailed)	Keterangan
Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (Y)	0,347** - 0,877**	0,005- 0,000	Valid
Sistem pengendalian intern (X)	0,453** - 0,830**	0,000- 0,000	Valid

Sumber: Data primer yang diolah, 2018

Hasil uji validitas diatas menunjukkan *Pearson Correlation* untuk setiap variabel yaitu kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dan sistem pengendalian intern signifikan pada tingkat signifikan 0,05 atau 0,01. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa semua pertanyaan dalam kuesioner tersebut mampu untuk mengukur variabel yang diharapkan.

### Hasil Uji Reliabilitas

Tabel 4.8  
Hasil Pengujian Reliabilitas

Nama Variabel	Cronbach's Alpha ( $\alpha$ )	Keterangan
Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (Y)	0,840	Reliabel
Sistem pengendalian intern pemerintah (X)	0,896	Reliabel

Sumber: Data primer yang diolah, 2018

Berdasarkan hasil pengujian reliabilitas pada tabel diatas, hasil perhitungan menunjukkan bahwa nilai *Cronbach's Alpha* ( $\alpha$ ) untuk setiap variabel adalah lebih besar dari 0,07. Dengan demikian, disimpulkan bahwa pertanyaan untuk masing- masing variabel dikatakan reliabel.

**Hasil Uji Asumsi Dasar**

**a. Hasil Uji Normalitas**

**Tabel 4.9**  
**Hasil Pengujian Normalitas**

Nama Variabel	Kolmogrov Smirnov	Asymp. Sig. (2-Tailed)	Keterangan
Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y)	1,172	0,128	Normal
Sistem pengendalian intern pemerintah (X)	0,852	0,462	Normal

Sumber: Data primer yang diolah, 2018

Berdasarkan hasil pengujian normalitas pada tabel diatas, dilihat bahwa masing-masing variabel memiliki nilai *kolmogrov-smirnov* lebih besar dari 0,05 sehingga variabel penelitian ini berdistribusi normal.

**b. Hasil Uji Asumsi Klasik**

**Tabel 4.10**

**a. Hasil Uji Multikolinearitas**

Nama Variabel	Tolerance	VIF	Keterangan
Sistem Pengendalian Intern	1000	1000	Tidak terjadi multikolinearitas

Sumber: Data primer yang diolah, 2018

Berdasarkan pengolahan data, dapat dilihat hasil perhitungan nilai tolerance dan VIF. Dapat disimpulkan bahwa variabel independen memiliki nilai tolerance > 0,10 dan nilai VIF < 10, sehingga tidak terjadi multikolinearitas.

**b. Hasil Uji Heteroskedastisitas**

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk melihat apakah terjadi kesamaan varian dalam model dari residual satu pengamatan dari pengamatan lainnya. Uji heteroskedastisitas digunakan dalam metode *Glejser*. Model regresi dikatakan bebas dari heteroskedastisitas apabila probabilitas signifikansi variabel independen diatas 0,05.

**Tabel 4.11**  
**Hasil Pengujian Heteroskedastisitas**

Nama Variabel	Sig.	Keterangan
Sistem pengendalian intern pemerintah (X)	0,577	Tidak terjadi Heteroskedastisitas

Sumber: Data primer yang diolah, 2018

Berdasarkan pengelolaan data, dapat diperoleh nilai signifikan sebesar 0,577. Jadi dapat disimpulkan bahwa nilai signifikansi 0,577>0,05, sehingga tidak terjadi heteroskedastisitas.

Hasil Uji Hipotesis

Tabel 4.12  
Hasil Pengujian Hipotesis

Variabel	Koefisien regresi	t Statistik	Sig.
Constant	32.925	11.545	0,000
SPIP	0,440	8.254	0,000
<i>Adjusted R Square</i>	0,516		
F Hitung	68.135		
Sig.	0,000		

Sumber: Data primer yang diolah, 2018

Berdasarkan tabel 4.12 diatas, dapat dilihat F hitung sebesar 68,135 dengan angka signifikansi 0,000. Karena nilai signifikansi dari data analisis lebih kecil dari 0,05 maka dapat diartikan bahwa model penelitian ini layak atau dapat digunakan untuk mengetahui pengaruh penerapan sistem pengendalian intern pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Berdasarkan tabel 4.12 diketahui bahwa nilai koefisien determinasi (*adjusted R square*) sebesar 0,516, yang berarti bahwa 51,6% variasi besarnya kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dapat dijelaskan oleh variasi sistem pengendalian intern.

Dari hasil analisis data, dilihat bahwa nilai koefisien dari variabel independen sistem pengendalian intern pemerintah (X) bernilai positif yaitu 0,440 dengan nilai signifikan bernilai 0,000 ( $< 0,05$ ). Hal ini berarti bahwa hipotesis yang menyatakan bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah "**Diterima**". Dari hasil analisis tersebut menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Nagekeo.

### Pembahasan

Pengaruh Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) dimaksudkan dengan tujuan memberikan keyakinan yang memadai agar tercapainya efektivitas tujuan penyelenggaraan pemerintah negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan (PP No. 60 Tahun 2008). Dengan ini, maka penyelenggaraan keuangan atas kegiatan pemerintahan dapat mencapai pengelolaan yang efektif dan efisien.

Dalam peraturan pemerintah (PP) Nomor 60 tahun 2008 disebutkan bahwa, untuk mencapai pengelolaan keuangan Negara yang efektif, efisien, transparansi, dan akuntabel, menteri atau pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati atau walikota wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan. Pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintah tersebut dilaksanakan dengan berpedoman pada Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Sistem Pengendalian Intern meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran- ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga keyakinan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi, serta dipatuhinya kebijakan manajemen. Unsur SPIP diantaranya lingkungan pengendalian, penilaian resiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi serta pemantauan pengendalian intern. Unsur-unsur tersebut dilaksanakan menjadi suatu bagian integral dari kegiatan instansi pemerintah. Dalam unsur lingkungan pengendalian, pimpinan instansi pemerintah wajib menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan sistem

pengendalian intern dalam lingkungan kerjanya melalui penegakan integritas, nilai etika, dan komitmen terhadap kompetensi, kepemimpinan yang kondusif, pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan, pendelegasian wewenang serta tanggungjawab yang tepat, perwujudan peran aparat pengawasan internal pemerintah yang efektif serta melalui hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah terkait.

Unsur pengendalian intern yang kedua adalah penilaian resiko. Penilaian resiko diawali dengan penetapan maksud dan tujuan instansi pemerintah yang tepat dan konsisten baik pada tingkat instansi maupun tingkat kegiatan. Setelah itu mengidentifikasi secara efisien dan efektif resiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan, baik yang bersumber dari dalam maupun dari luar instansi. Pimpinan instansi pemerintah merumuskan pendekatan manajemen resiko dan kegiatan pengendalian resiko yang diperlukan untuk memperkecil resiko.

Kegiatan pengendalian intern adalah kebijakan dan prosedur yang dapat membantu memastikan dilaksanakannya arahan pimpinan instansi pemerintah untuk mengurangi resiko yang telah diidentifikasi selama proses penilain resiko (PP 60 tahun 2008). Dalam instansi pemerintah harus memiliki informasi yang relevan dan andal baik informasi keuangan maupun nonkeuangan. Informasi tersebut harus direkam dan dikomunikasikan kepada pimpinan instansi pemerintah dan lainnya diinstansi pemerintah yang memerlukannya dalam bentuk serta dalam waktu yang bersangkutan melaksanakan pengendalian intern dan tanggungjawab operasional. Unsur pengendalian intern yang kelima adalah pemantauan. Pemantauan dilaksanakan melalui pemantauan berkelanjutan, evaluasi terpisah, dan tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan review lainnya. Pemantauan berkelanjutan dilaksanakan melalui kegiatan pengelolaan rutin, supervisi, perbandingan, rekonsiliasi, dan tindakan lain yang terkait dalam pelaksanaan tugas. Evaluasi terpisah dilaksanakan melalui penilaian sendiri, review, dan pengujian efektivitas Sistem Pengendalian Intern yang dapat dilaksanakan oleh aparat pengawasan intern pemerintah atau pihak eksternal pemerintah dengan menggunakan daftar uji pengendalian intern.

Jadi, Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dapat disimpulkan sebagai suatu proses yang telah dirancang sedemikian rupa untuk mencapai tujuan yang diinginkan pemerintah serta dapat memberikan keyakinan atas tercapainya dalam penyelenggaraan pemerintahan. Indikator untuk mengukur variabel yang didasarkan pada PP No. 60 Tahun 2008, yaitu lingkungan pengendalian, penilaian resiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan. Berdasarkan data jawaban responden, rata-rata responden menjawab kadangkadangkang untuk setiap indikator penilaian, yang artinya dari kelima unsur pengendalian tersebut masih belum dilaksanakan secara efektif. Berdasarkan tabel 4.12 diketahui bahwa nilai koefisien determinasi (*adjusted R square*) sebesar 0,516, yang berarti bahwa nilai 51,6% variasi besarnya Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dapat dijelaskan oleh variasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

Dari hasil analisis data, dilihat bahwa nilai koefisien dari variabel independen Sistem pengendalian Intern Pemerintah (X) bernilai positif yaitu 0,440 dengan nilai signifikansi berniali 0,000 ( $< 0,05$ ). Berdasarkan hasil pengujian hipotesis dapat disimpulkan bahwa sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten Nagekeo. Semakin baik penerapan sistem pengendalian intern pemerintah maka semakin baik pula kualitas laporan keuangan yang dihasilkan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Yosefrinaldi (2013) yang menyatakan bahwa sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan berita BPK RI atas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) Kabupaten Nagekeo tahun 2017 disebutkan bahwa Pemerintah Kabupaten Nagekeo mendapatkan opini wajar dengan pengecualian (WDP). Salah satu aspek yang menyebabkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Nagekeo kembali mendapatkan opini wajar dengan pengecualian yakni kelemahan pengendalian intern yang

signifikansi atas pemantauan dan penyajian aset tetap. Dari beberapa aspek diatas dapat disimpulkan bahwa penerapan sistem pengendalian intern pemerintah Kabupaten Nagekeo belum dijalankan secara efektif. Hal ini menjadi peraturan serius kepada Pemda Nagekeo agar Penerapan Sistem Pengendalian Intern menjadi lebih baik dimasa yang akan datang.

### Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sistem pengendalian intern, kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, dan mengetahui pengaruh penerapan sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Nagekeo. Berdasarkan hasil penelitian, maka kesimpulan dari penelitian ini adalah sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Nagekeo. Artinya bahwa, semakin baik pelaksanaan unsur SPIP maka semakin baik pula kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yang dihasilkan.

### SARAN

1. Peneliti selanjutnya diharapkan untuk bisa mendapatkan data secara keseluruhan dari semua dinas atau instansi yang ada, agar hasil yang diperoleh lebih maksimal.
2. Untuk peneliti selanjutnya dapat melengkapi metode penelitian dengan menggunakan daftar pertanyaan dan melakukan wawancara langsung.

### DAFTAR RUJUKAN

- Ghozali, Imam. (2011). *Aplikasi Analisis Multivariat Dengan Program SPSS*. Badan Penerbitan Universitas Diponegoro: Semarang.
- Mahmudi. (2010). *Analisa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Edisi kedua*. UPP STIM YPKN. Yogyakarta
- Nurmaziah, (2013). *Pengaruh Penerapan Pengendalian Internal dan Kompetensi PPK-SKPD terhadap Kualitas Laporan Keuangan SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Sabang, Tesis*. Banda Aceh Universitas Syiah Kuala.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008. *Sistem pengendalian intern pemerintah*.
- Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010. *Standar Akuntansi Pemerintahan*. PP RI
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang *Standar Akuntansi Pemerintahan*.
- \_\_\_\_\_. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- \_\_\_\_\_. 2008. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
- Suhaili, 2012. *Pengaruh Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dan Peran Auditor Internal Pemerintah terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Kota Subulussalam, Tesis*. Banda Aceh Program Pascasarjana Universitas Syiah Kuala.
- Syamsuar. 2013. *Pengaruh Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan dan Penerapan Sistem Pengendalian Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada SKPD Aceh Besar. Tesis*. Banda Aceh. Program Pascasarjana Universitas Syiah Kuala.
- Yosefrinaldi. 2013. *Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Dengan Variabel Intervening Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Studi Empiris Pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset*

Yudianta, I Gede Agus & Erawati, Ni Made Adi. 2012. *Pengaruh Sumber Daya Manusia, Teknologi Informasi dan Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan*. Fakultas Ekonomi. Universitas Udayana. Bali.

Zuliarti. 2012. *Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Pengendalian Intern Akuntansi Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah : Studi Pada Pemerintah Kabupaten Kudus*. Skripsi. Universitas Muria Kudus. Kudus